

**PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA TRANSFER  
UNTUK MENJAMIN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
DI KABUPATEN WONOSOBO**

Reflay Ade Sagita\*, Widayati\*\*

\*Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang

\*\*Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

**ABSTRACT**

The village fund policy is the real action of the Indonesian government to realize one of the elements in Nawacita namely "Building Indonesia from edge". The government allocates funds sourced from the State Revenues and Expenditures Budget for villages, then transferred through the Regional Revenue and Expenditure Budget and is used to finance the implementation of governance, development implementation, community development and community empowerment

The use of funds must be in accordance with the applicable provisions, the realization of the objectives of the use of the budget to improve the welfare of the community, budget management must be supported by regulations that are regulated, pay tax obligations, increased competence village officials can support the implementation of governance in the village, especially in terms of management Finance

The purpose of this research is to know and explain Regulation of Wonosobo Regent Number 47 Year 2015 about Guidance of Implementation of Transfer Fund To Village Year 2015, To know and explain ways to improve accountability of financial management in Wonosobo regency and to know and explain source of problem in Supervision of fund transfer To be accountable for village financial management in Wonosobo district and how to solve it.

The result of this study is that there are procedural errors in the utilization of transfer funds that are not available properly. The low quality of human resources involved in the use and management of the budget added to the complexity of the problems that arise in managing the transfer funds to the village. It is necessary to build a well-integrated system so that policies can be made well and can be enjoyed by the villagers

Keywords: supervision, management, funds transfer, village, accountability

---

**PENDAHULUAN**

Pemerintah Daerah di dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Dalam Pasal 18B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan – satuan pemerintahan daerah

yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan ini mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa (baik provinsi, kabupaten dan kota, maupun desa).

Pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) pada tanggal 15 Januari 2014. Dari sisi regulasi, desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) telah dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

UU Desa dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur desa ini, tentunya membawa konsekuensi tersendiri karena desa sekarang dihadapkan pada pengelolaan keuangan yang cukup besar dan lebih besar dari yang ada sebelumnya, karena adanya pengelolaan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa yang cukup besar yang dalam pengelolaannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dana yang diperuntukkan bagi desa inilah yang dikenal sebagai dana desa dan mulai disalurkan pada tahun anggaran 2015 dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

Kabupaten Wonosobo adalah salah satu dari beberapa kabupaten di Jawa Tengah yang responsif terhadap tuntutan desa. Kabupaten Wonosobo telah mengalokasikan dana untuk desa yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD), sebagai analogi DAU dari pemerintah pusat dengan yang dipraktikan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo kepada desa, dengan harapan pembangunan semakin merata sampai ke tingkat desa.

Penggunaan dana desa pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo, perlu adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah desa agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran Dana Desa. Pengelola Alokasi Dana Desa di desa adalah Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa diharapkan mengerti dan paham dalam pengelolaan alokasi dana desa. Mengingat besaran Alokasi Dana Desa yang disalurkan kepada desa nilainya cukup besar, maka Pemerintah

Kabupaten Wonosobo perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa. Pada fase berikutnya juga perlu dikaji secara mendalam mengenai dampak yang ditimbulkan Alokasi Dana Desa terhadap peningkatan prasarana umum, penyerapan tenaga kerja di desa serta pemberdayaan masyarakat dan perkembangan kelembagaan desa di Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2015?
2. Bagaimanakah pengawasan dana transfer untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo?
3. Apa saja yang menjadi masalah dalam pengawasan dana transfer untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo dan bagaimana solusinya?

## PEMBAHASAN

Tujuan diberikan dana transfer desa yaitu untuk membuat desa lebih maju, baik dalam kualitas sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukungnya. Secara rinci dana transfer desa meliputi dana desa, dana desa dari Pemerintah Kabupaten, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Prioritas yang terkait dengan pembangunan desa, antara lain mencakup pembangunan dan pemeliharaan:

- a. Infrastruktur desa, senderan dan jalan permukiman;
- b. Jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian dan prasarana kesehatan desa seperti air bersih, sanitasi lingkungan, dan Posyandu;
- c. Sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, seperti taman bacaan masyarakat, pendidikan usia dini dan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- d. Sarana dan prasarana ekonomi/usaha ekonomi produktif seperti pasar desa, pembibitan tanaman pangan, lumbung desa, pembukaan lahan pertanian, serta pengembangan usaha ikan dan ternak.

Sedangkan prioritas untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain berupa:

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. Pelatihan teknologi tepat guna;
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok usaha ekonomi, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, dan kelompok perempuan.

## **Implementasi Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2015**

Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2015 sudah berjalan sesuai dengan isi dari Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015. Dana Transfer Ke Desa telah diimplementasikan oleh desa yang ada di Wonosobo untuk pembangunan berbagai sarana dan prasarana penunjang kegiatan dan kualitas SDM Pemerintahan Desa. Namun ada beberapa desa yang masih mengalami kesulitan dalam penyusunan pelaporan penggunaan anggaran, sehingga dalam pelaksanaannya ada yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2015.

Pembangunan desa di Kabupaten Wonosobo merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab kepala desa. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut di ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa.

Dalam pelaksanaan pembangunan kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan. Strategi pembangunan desa sendiri bisa dijabarkan menjadi strategi khusus pembangunan, seperti *grand strategy* penataan kembali manajemen pemerintah desa dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah agar kinerjanya dapat profesional, jujur, mampu memecahkan permasalahan ekonomi di masyarakat.

Kabupaten Wonosobo salah satu kabupaten yang mengambil inisiasi kebijakan untuk mengintegrasikan pendapatan yang masuk ke desa melalui mekanisme pengelolaan ketiga dana, yakni dana desa yang berasal dari APBN, alokasi dana desa yang berasal APBD tingkat II dan dana bagi hasil pajak dan retribusi yang berasal dari APBD tingkat II, yang selanjutnya disebut sebagai dana transfer ke desa, melalui terbitnya Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2015, yang mengatur mengenai tata cara pengalokasian, pertanggungjawaban dan pengawasan tentang dana tersebut. Total besaran dana transfer ke desa sendiri Rp 147,64 miliar pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2016 mencapai Rp241,79 miliar atau melonjak 63,7 persen dibandingkan 2015<sup>1</sup> yang sedianya dipergunakan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.

---

<sup>1</sup> Available at <http://www.antarajateng.com/detail/dana-desa-mengalir-lebih-deras-ke-wonosobo.html> tanggal 22 Oktober 2016

Pengelolaan keuangan oleh perangkat desa di Kabupaten Wonosobo sudah baik dengan indikator transparan, akuntabel dan partisipatif. Masyarakat sangat berperan dalam mendorong tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Apabila tingkat partisipasi warga rendah terhadap pengelolaan dana transfer, maka dapat dimungkinkan akan menimbulkan penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa. Dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengajak dan mendorong masyarakat di desa untuk lebih berperan aktif dalam pemanfaatan dana transfer. Namun masih terdapat beberapa desa yang bermasalah dengan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang belum tertib dan perlu pengawasan serta pembinaan ekstra dari Pemerintah Daerah agar meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran.

Terkait dengan penyalurannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari [APBN](#) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan, Tahap I pada bulan April sebesar 40%, Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% dan tahap III pada bulan Nopember sebesar 20%, dimana pada setiap tahap dilakukan paling lambat pada Minggu kedua, dan penyalurannya ke Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima di Kas Daerah. Ini artinya bahwa pada minggu kedua April 2015 ini, dana Desa tersebut akan ditransfer oleh pemerintah pusat ke Daerah dan setelah itu dalam kurun waktu paling lambat 7 hari akan ditransfer ke Rekening Desa.

Dengan tugas dan tanggung jawab tersebut maka Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa perlu mempersiapkan sebaik-baiknya pelaksanaan Dana Desa tersebut, mengingat amanah UUD 1945 disebutkan bahwa Anggaran Negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jangan kemudian, Dana Desa yang dimaksudkan dalam upaya mempercepat pembangunan Daerah dalam hal ini Desa justru tidak mampu dikelola dengan baik oleh Aparatur di Daerah terutama Aparatur Desa. Pemerintah pusat juga diharapkan untuk tepat waktu dalam mentransfer Dana Desa tersebut, sehingga perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa dapat berjalan dengan baik.

Desa-desanya di Kabupaten Wonosobo yang mendapatkan dana transfer ke desa berkewajiban untuk mengelola sesuai peraturan yang berlaku. Sebab pengelolaan keuangan merupakan sarana yang tepat sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). Menerapkan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan dana transfer ke desa tepat sebab dapat digunakan sebagai acuan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pengelolaan keuangan. Untuk melihat akuntabilitas

Pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa salah satunya yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari: pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri

1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran yang berkenaan.
2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan
3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Selain bentuk pertanggungjawaban yang berupa laporan, bentuk lain dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat baik secara tertulis maupun media lain yang mudah diakses masyarakat.

Di Wonosobo sendiri Pertanggungjawaban kepada masyarakat belum sampai pada tahap mempublikasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, karena banyak kendala-kendala dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban. Namun kepala desa memiliki harapan besar untuk dapat mewujudkan hal tersebut pada tahun mendatang agar transparansi atau keterbukaan penerimaan dana dan penggunaan dana dapat secara mudah diakses masyarakat.

Dana transfer ke desa ini akan dialokasikan kepada 236 desa di Kabupaten berdasarkan asas merata dan proporsional melalui beberapa indikator yang telah ditetapkan, yang akan disalurkan kepada desa dalam 3 tahap. Tahap I sebesar 40% pada bulan Mei atau Juni, tahap II sebesar 40% pada bulan Agustus dan tahap III sebesar 20% pada bulan Oktober. Dana ini akan disalurkan ke masing-masing rekening kas desa yang berada di Bank Wonosobo.<sup>2</sup>

Indikator yang ditetapkan, antara lain untuk Dana Desa yang berasal dari APBN 90% dibagi merata dan sisanya dibagi proporsional berdasar jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Rumah Tangga Miskin dan indeks kesulitan geografis. Sedang untuk Alokasi Dana Desa yang berasal APBD tingkat II 50% dibagi merata dan 50% dibagi proporsional berdasar jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Rumah Tangga Miskin dan indeks kesulitan geografis, serta untuk Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang berasal dari APBD tingkat II 60% dibagi merata dan sisanya 40% dibagi proporsional berdasar pokok dan realisasi setoran PBB.

Terkait penggunaan, Dana Transfer ke Desa ini digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang didasarkan pada kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

---

<sup>2</sup> Available at <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/10-desa-dapat-transfer-rp-24-miliar/> tanggal 22 Oktober 2016

Selain digunakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan meningkatkan kinerja pemerintahan desa, dana transfer ke desa juga digunakan untuk mendanai kegiatan desa yang bersifat melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan mengembangkan sistem jaminan sosial sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, dengan prioritas pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Khusus Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk mendanai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang didasarkan atas kondisi dan potensi Desa dan sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya. Setiap kegiatan yang didanai oleh Dana Transfer ke Desa ini harus didasarkan pada hasil musyawarah bersama dengan masyarakat desa.

Sedangkan untuk syarat penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I sebesar 40% pada tahun 2015, desa harus menyelesaikan beberapa kewajibannya yakni menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015, membuat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPP) kepada BPD Tahun 2014, menyusun Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) kepada Bupati Tahun 2014, mengesahkan Perdes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun 2014 serta menyerahkan Profil Desa Tahun 2014.

Selain itu, desa harus menyusun dokumen diantaranya Perdes tentang APBDesa dan Perkades tentang Penjabaran APBDesa tahun 2015 dilengkapi dengan berita acara persetujuan bersama RAPBDes dan daftar hadir rapat pembahasan RAPBDes, Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa, Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Desa, Rekening Kas Desa pada Bank Wonosobo, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pengantar Camat dan Lembar verifikasi persyaratan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I dari Tim Pendamping Kecamatan. Sedangkan untuk dapat mengakses dana transfer ke desa Tahap II dan III, desa harus melengkapi dokumen antara lain laporan realisasi kegiatan per tahapan, bukti saldo akhir Rekening Kas Desa, foto pelaksanaan kegiatan dan berita acara pelaporan realisasi kegiatan per tahapan kepada BPD.

### **Pengawasan dana transfer untuk menjadi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo**

Pengawasan memegang peranan penting dalam memastikan agar pengelolaan dana desa berjalan dengan akuntabel, transparan, dan partisipatif demi kemaslahatan umum masyarakat desa. Pengawasan

yang ketat, terkontrol, profesional, dan berintegritas menjadi prasyarat penting. Pengelolaan keuangan desa sesungguhnya diawasi secara berlapis oleh banyak pihak. Pengawasan di atur dalam Pasal 68 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2015

Untuk mencegah penggunaan bantuan dana desa tak tepat sasaran atau diselewengkan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyiapkan tenaga pendampingan desa atau para relawan untuk mengawasi penggunaan dana desa di setiap desa. Tenaga pendampingan desa atau para relawan tersebut diberi pelatihan ihwal anggaran desa, aset pemerintahan desa, hingga potensi masing-masing desa. Setiap desa ada lima orang relawan pengawas anggaran desa. Para relawan itu direkrut dari berbagai pihak, seperti aktivis pemuda desa, bekas pamong desa, para guru, pegawai negeri sipil, tokoh desa, dan lain-lain. Proses pengemblengan para relawan itu melalui pelatihan yang diberi nama Sekolah Pembaharuan Desa.

Tenaga pendampingan desa atau para relawan yang sudah mengikuti pelatihan akan diterjunkan langsung ke desa. Mereka membantu aparat desa agar anggaran desa bisa tepat sasaran dan tak ada penyelewengan. Misalnya, relawan bersama aparat desa melakukan analisis kebijakan desa berbasis pada aset, relawan juga didorong bisa ikut mengawasi penggunaan dana dan kebijakannya, menyusun aset berbasis manajemen, hingga terlibat dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES). Tak hanya itu, relawan juga harus bisa ikut mengevaluasi dan memberikan masukan atas kebijakan di masing-masing desa. Relawan juga mengikuti pelatihan pemetaan sosial di masing-masing desa yang bertujuan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan tentang pemetaan sosial di masing-masing desa di Wonosobo sebanyak 236 desa.

Pendampingan desa merupakan aspek lain yang berperan krusial dalam menentukan terjaminnya pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pasal 128 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pendampingan masyarakat desa dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga. Sementara itu, ayat 3 pasal yang sama menyebutkan bahwa camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat desa di wilayahnya. Ini artinya, pendampingan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan bahkan swasta. Pendampingan oleh jajaran pemerintah dikoordinasikan oleh Kemendagri dan pendampingan oleh masyarakat dikoordinasikan Kemendes PDTT.

Tugas pendampingan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Pendamping desa merupakan aktor di tingkat masyarakat yang berperan penting dalam mengawal pengelolaan keuangan desa. Mereka melakukan fasilitasi untuk pemerintah dan masyarakat desa agar kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan,



dan kemasyarakatan dapat berjalannya dengan efektif demi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa telah mengatur dengan rinci mengenai pendampingan desa ini, di antaranya tujuan pendampingan desa, ruang lingkup pendampingan desa, tugas pendamping desa, manajemen pendampingan desa, dan pendanaannya. Di dalamnya disebutkan bahwa tujuan pendampingan desa meliputi:

1. meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
2. meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
3. meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antar sektor; dan
4. mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris (Pasal 2 Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015).

Adapun pendampingan desa terdiri atas tenaga pendamping profesional (yang terdiri atas pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan, pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang berkedudukan di pusat dan provinsi), kader pemberdayaan masyarakat desa yang berkedudukan di desa dan diperoleh melalui mekanisme musyawarah desa, dan pihak ketiga (terdiri dari LSM, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan perusahaan).

### **Sumber masalah dalam pengawasan dana transfer untuk menjadi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo dan bagaimana solusinya**

Kendala yang dihadapi masyarakat desa di Wonosobo tentang Dana Transfer adalah kurangnya akses yang tersedia agar masyarakat mengetahui manfaat dan kegunaan dari Dana Transfer Ke Desa. Dampak dari kurang tersedianya akses tersebut adalah minimnya partisipatif masyarakat dalam program yang dibuat desa. Masyarakat masih dipandang sebagai objek dalam penggunaan anggaran Dana Transfer, padahal tujuan dari Pemerintah Daerah Wonosobo adalah menjadikan masyarakat subyek dari Dana Transfer Ke Desa. Kendala yang dihadapi pengguna anggaran dilapangan lebih beragam, mulai dari teknis pelaksanaan, rendahnya kualitas sdm hingga kesalahan dari pihak ketiga.

Sumber masalah dalam pengawasan dana transfer desa di Kabupaten Wonosobo yaitu

1. Proses perencanaan dan pelaksanaan dana transfer desa belum memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan dana transfer desa. Hal tersebut dapat dilihat dari kurang partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan dari masyarakat luas yang berkepentingan dalam pengelolaan dana transfer desa. Ketidaksiapan antara perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan dana transfer desa. Hal tersebut didukung kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan tersebut serta sikap apatis dari aparat

pemerintah desa serta tidak adanya relevansi keberadaan desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam perencanaan dan pelaksanaan dana transfer desa.

2. Sebagian besar penggunaan dana transfer desa lebih banyak diarahkan pada kegiatan fisik (pembangunan sarana dan prasarana fisik), disusul kemudian untuk penambahan kesejahteraan perangkat desa dalam bentuk dana purna bakti, tunjangan, dan sejenisnya serta sebagian lagi untuk kegiatan rutin. Meskipun terdapat regulasi dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang mengatur secara rinci tentang penggunaan dana transfer desa oleh masing-masing desa, regulasi tersebut banyak yang belum dapat diimplementasikan dengan baik. Sebagai contoh, persentase bagian dari dana transfer desa yang diterima oleh lembaga kemasyarakatan desa yang besarnya tidak sesuai dengan aturan yang ada.
3. Masih adanya sebagian desa yang belum melakukan sosialisasi pertanggungjawaban pelaksanaan dana transfer desa kepada masyarakat secara transparan karena menganggap pertanggungjawaban cukup dilakukan pada pemda saja. Sebagian besar kepala desa maupun pengurus lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Hansip, BPD, Karang Taruna, RT/RW, LKMD) mengharapkan besaran dana transfer desa sekitar Rp100.000.000. Namun, sebagian besar masyarakat memaklumi sistem penentuan besaran dana transfer desa dapat berbeda antar desa disesuaikan dengan berbagai faktor, antara lain yaitu jumlah penduduk, keterjangkauan desa, serta potensi masing-masing desa. Selain itu, penyaluran dari Pemerintah Desa ke lembaga kemasyarakatan desa perlu dibenahi antara lain dengan meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa, termasuk pada saat penyusunan ABPDesa.
4. Permasalahan lain berkaitan dengan akuntabilitas administrasi keuangan dana transfer desa. Sebagian besar pemerintahan desa tidak berhasil mewujudkan akuntabilitas, baik akuntabilitas vertikal maupun horizontal. Sistem dan mekanisme pelaporan keuangan yang telah disusun dengan baik dan rinci oleh pemerintah kabupaten, ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh perangkat desa. Masih ada desa yang mendapatkan program dana transfer desa mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan.
5. Rendahnya kemampuan administratif perangkat desa, tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah kabupaten terkait dengan ketidaktertiban administrasi keuangan, serta masyarakat perdesaan yang kurang peduli terhadap persoalan akuntabilitas administrasi keuangan dana transfer desa. Laporan survei BPS tahun 2015 juga menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi dalam membuat laporan keuangan desa sebagian besar disebabkan terbatasnya kemampuan SDM, tidak adanya pedoman dan tidak adanya pelatihan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Implementasi Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2015 sudah berjalan namun belum keseluruhan penggunaan dananya efektif dan akuntabel. Hal tersebut terlihat dari masih adanya program yang tidak sesuai dengan tujuan serta fungsi dana transfer dan juga masih terdapat sistem pelaporan penggunaan anggaran dari desa yang masih molor. Namun dibagian lain, setiap desa di Kabupaten Wonosobo telah memiliki RPJMDes, RKPDDes, dan APBDDes, dan tidak mengalami kesulitan dalam penyusunannya, disebabkan Desa telah melengkapi dokumen dimaksud sebelumnya karena desa desa tersebut sebelumnya sudah mendapatkan bantuan program PNPM Pedesaan dengan syarat kelengkapan dokumen dimaksud;
2. Pengawasan penggunaan dana transfer di Kabupaten Wonosobo sudah berjalan baik. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan kepada aparatur pelaksana pengelolaan dana desa belum terlaksana maksimal dikarenakan banyaknya program yang perbaikan sarana prasarana desa, sehingga program peningkatan kualitas SDM masyarakat desa seolah dikesampingkan. Peningkatan kualitas SDM pemerintahan desa telah dilaksanakan dengan baik meliputi pelatihan dan BinteK Pengelolaan Keuangan Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pengawasan terhadap pelaksanaan dana transfer ke desa di Kabupaten Wonosobo meliputi pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja maupun pengawasan oleh masyarakat. Terkait monitoring dan pengawasan Dana Transfer ke Desa tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan BPK langsung ke desa. BPK dalam melakukan pengawasan tidak kasus per kasus, tapi dalam bentuk pemeriksaan rutin segala bentuk laporan pertanggungjawaban yang diperlukan. Pengawasan keuangan desa tahun 2015 di Kabupaten Wonosobo telah dilaksanakan dan semakin banyak desa yang mampu serta patuh terhadap aturan penyusunan sistem keuangan desa tersebut.
3. Sumber masalah dalam pengawasan dana transfer desa di Kabupaten Wonosobo yaitu dalam perencanaan, pelaksanaan, kualitas pelaporan, dan lemahnya kelembagaan desa serta koordinasi dengan pemda kotamadya/kabupaten. Berbagai permasalahan yang melingkupi implementasi kebijakan dana transfer desa memerlukan perbaikan melalui langkah-langkah yaitu Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, Sosialisasi petunjuk pelaksanaan dana transfer desa, serta pendampingan dari dinas terkait untuk proses perencanaan dan pelaksanaan dana transfer desa. Perlunya pemahaman kepada masyarakat tentang tujuan dan manfaat dana transfer desa

## Saran

1. Diperlukan peningkatan peran dari pemerintahan pusat maupun daerah, terkait adanya regulasi/kebijakan dan fasilitasi dari pemerintah pusat terdiri dari 3 (tiga) Kementerian yang berkaitan dengan operasionalisasi pelaksanaan Dana Desa agar mensinergikan/mensinkronkan regulasi khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta panduan kebijakan pengelolaan keuangan dari Kementerian Keuangan.
2. Pihak Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini SKPD terkait yaitu BPKAD dalam penyusunan Peraturan Bupati setiap tahunnya yang terkait Tata cara penghitungan Dana Desa setiap desa; Penetapan rincian Dana Desa; Mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa; Prioritas penggunaan Dana Desa; Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan Sanksi berupa penundaan penyaluran dan pemotongan, diupayakan agar peraturan yang dibutuhkan dapat tepat waktu, sehingga mempermudah dalam penyaluran Dana Desa RKUN ke RKUD. Selain itu diperlukan upaya penyederhanaan peraturan bagi desa terkait dalam penyaluran Dana Desa, dan guna memperlancar proses penyaluran dana Desa diperlukan ketersediaan dokumen seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes tepat waktu disetiap tahunnya. Untuk mendukung hal tersebut maka diperlukantenaga pendamping desa, sehingga dapat mempermudah penyusunan Dokumen dan proses pengelolaan dana Desa;
3. Penggunaan dana Desa diharapkan senantiasa disesuaikan dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang diprioritaskan pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Alwi, Hasan. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Asnawi Rewansyah, Dr., MSc, 2011, *Kepemimpinan Dalam Pelayanan Publik*, Jakarta : STIA-LAN
- Barker, A. 1982. 'Governmental Bodies and the Network of Mutual Accountability', in Barker (ed), *Quangos in Britain*, London: Macmillan, 3-33
- Borgonovi, Elio & Eugenio Anessi, 1997. Accountability and Accounting in Public Administration : a Framework, The 6<sup>th</sup> CIGAR Conference of Local Government Accounting, Paris
- Caiden, N. And Wildavsky, A, 1974. *Planning and Budgeting in Poor Countries*, New Brunswick, NJ : Transaction

- Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, 2013, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik, vol I, No. 6
- Chabib soleh, dkk, 2010, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Fokusmedia : Bandung*
- Deputi Bidang Pencegahan – KPK, 2015, *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa : Dana Desa dan Alokasinya*, Penerbit Anti-Corruption Clearing House, Jakarta
- Devas, N. 1997. 'Indonesia: what do we mean by decentralization?'. *Public Administration and Development*, 17, 351-367
- Ellwood, sheila (Autumn 1993) "Parish and Town Councils: Financial Accountability and management", *Local Government Studies* Vol. 19, pp: 368-386
- Flynn, Norman, 1997, *Public Sector Management*, 3<sup>rd</sup> Ed., London: Prentice Hall
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Penerbit Erlangga, Jakarta, h.2
- Insukrindo, Mardiasmo and Widayat, W, 1994. *Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Usaha Peningkatan PAD*, KKD, FE UGM, Yogyakarta
- Inu Kencana Syafiie, dkk., 1999. *Ilmu Administrasi Publik* . PT Rineka Cipta, Jakarta, h.82
- Justisia S Maabuat, 2016, *Kebijakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016*, Makalah, Universitas Samratulangi, Manado
- Poerwadarminta, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h.327.
- R. Bintaro, 1989, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Siagian, 2009, *Pokok-Pokok Pengawasan*, Rineka Cipta, Jakarta, h.107
- Soelaeman, 2009, Moenandar, *Ilmu Sosial Dasar : Teori dan Konsep Ilmu*. Refika Aditama, Bandung, h.132
- Widjaja, A.W. 1998. *Titik Berat Otonomi Daerah: Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, Jakarta, h.57
- Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*: Yogyakarta, Rineka Cipta, h.121

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 *Hasil Amandemen dan Proses Amandemen pertama-keempat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2015